

# Studi Komparatif Keterikatan Tempat (*Place Attachment*) pada Komunitas Relokasi dan *In-Situ* Pascabencana Likuifaksi di Sulawesi Tengah

\*Adnagmesha Magfirah Ramadhani Najib<sup>1</sup>, Bakti Setiawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

\*Corresponding Author, Email: [adnagmesha.mr@gmail.com](mailto:adnagmesha.mr@gmail.com)

## Abstrak

Rekonstruksi perumahan pascabencana merupakan tahapan krusial yang seringkali berfokus pada pemulihan fisik, sementara pemulihan hubungan emosional antara manusia dan tempat tinggalnya kerap terabaikan. Hal ini memunculkan urgensi untuk memahami bagaimana kebijakan rekonstruksi memengaruhi dimensi kemanusiaan para penyintas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif dampak dari dua skema rekonstruksi, relokasi ke Hunian Tetap (*Huntap*) dan dana stimulan *in-situ*, terhadap pemulihan keterikatan tempat (*place attachment*) pada Warga Terdampak Bencana (WTB) Dusun III Vou, Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus komparatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pendekatan menghasilkan konsekuensi yang berbeda secara fundamental. Skema relokasi berhasil memberikan keamanan fisik dari trauma lingkungan, namun secara signifikan memutus ikatan fungsional warga dengan mata pencaharian agraris mereka. Sebaliknya, skema *in-situ* berhasil mempertahankan keberlanjutan sosio-ekonomi dan kohesi sosial, meskipun penyintas harus hidup berdampingan dengan trauma tempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pilihan kebijakan rekonstruksi merepresentasikan dilema antara pemulihan keamanan fisik dan keberlanjutan sosio-ekonomi, yang mengimplikasikan perlunya model pemulihan yang lebih holistik di masa depan.

**Kata kunci:** Pascabencana, Rekonstruksi Perumahan, Keterikatan Tempat, Relokasi, *In-situ*.

## Abstract

*Post-disaster housing reconstruction is a crucial stage that often focuses on physical recovery, while the restoration of the emotional connection between people and their homes is frequently overlooked. This raises an urgent need to understand how reconstruction policies affect the human dimension of survivors. Therefore, this study aims to comparatively analyze the impact of two reconstruction schemes, relocation to permanent housing (Huntap) and in-situ stimulant funds, on the recovery of place attachment among the survivor community of Dusun III Vou, Central Sulawesi. This research is using a qualitative method with a comparative case study design, data were collected through in-depth interviews and field observations. The findings indicate that the two approaches yield fundamentally different consequences. The relocation scheme succeeded in providing physical security from environmental trauma but significantly severed the community's functional ties to their agrarian livelihoods. Conversely, the in-situ scheme successfully maintained socio-economic continuity and social cohesion, although survivors must live with place-based trauma. This study concludes that the choice of reconstruction policy represents a dilemma between recovering physical security and ensuring socio-economic sustainability, implying the need for more holistic recovery models in the future.*

**Keywords:** Post-Disaster, Housing Reconstruction, Place attachment, Relocation, *In-situ*.

## I. PENDAHULUAN

Bencana alam yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 merupakan salah satu peristiwa paling kompleks dalam sejarah kebencanaan Indonesia. Gempa bumi berkekuatan 7,5 SR tidak hanya memicu tsunami yang menghancurkan wilayah pesisir, tetapi juga menyebabkan fenomena ikutan berupa likuifaksi. Fenomena ini secara masif melenyapkan dan mengubah bentang alam di beberapa wilayah, termasuk Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi (Amiruddin & Lumbaa, 2024; Samad et al., 2020). Kerusakan masif pada sektor perumahan menjadi salah satu dampak paling krusial yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Tercatat bahwa bangunan hunian yang hancur atau rusak mencapai 68.451 unit rumah (Hutabarat et al., 2019). Bencana ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kerugian material, tetapi juga mengubah fondasi kehidupan masyarakat dari segi sosial, ekonomi, dan budaya mereka (Husain, 2022; Iswari, 2020).

Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi berbagai sektor, namun hingga tahun kelima setelah bencana, beberapa wilayah seperti Kota Palu dan Parigi Moutong tetap belum pulih penuh, menandakan kebutuhan akan program pemulihan yang lebih berkelanjutan dan partisipatif (Elintia et al., 2024). Implementasi kebijakan nasional seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 dimaksudkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, namun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkadang kurang efektif, sehingga implementasi di tingkat lokal, termasuk di Kota Palu, menghadapi tantangan komunikasi dan sinkronisasi kebijakan (Bahri, 2024).

Di tingkat lokal, mandat Inpres tersebut diterjemahkan ke dalam kerangka kerja strategis seperti Peraturan Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2019, yang memfokuskan salah satu strateginya pada penyediaan kembali hunian bagi Warga Terdampak Bencana (WTB). Kebijakan ini melahirkan dua skema bantuan utama: pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di lokasi baru (relokasi) bagi warga di zona merah, dan penyaluran dana stimulan untuk rekonstruksi mandiri di lokasi semula (*in-situ*). Implementasi kedua skema rekonstruksi ini secara tidak langsung telah membelah satu komunitas yang berasal dari daerah yang sama. Salah satu daerah yang mengalami fenomena ini yakni Dusun III Vou, menjadi dua kelompok dengan bentuk pemulihan yang sangat berbeda. Kelompok pertama harus beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial yang baru, sementara kelompok kedua harus membangun kembali kehidupan di atas tanah bekas bencana yang telah berubah. Perbedaan fundamental dalam pengalaman pemulihan ini mendorong sebuah pertanyaan krusial yang melampaui sekadar evaluasi teknis bangunan: Bagaimana proses rekonstruksi yang berbeda ini memengaruhi pemulihan dimensi kemanusiaan yang paling mendasar, yakni hubungan emosional antara individu dengan tempat tinggalnya?

Pemulihan pascabencana seringkali diukur melalui indikator fisik dan ekonomi. Namun, tujuan utama dari rekonstruksi seharusnya tidak hanya membangun kembali 'bangunan' (*house*), tetapi juga memulihkan makna 'rumah' (*home*). Rumah berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kehidupan dan penghidupan, yang mencakup aspek perilaku, aktivitas, kenyamanan, dan lingkungan (Sembiring et al., 2016). Rumah menjadi sebuah ruang psiko-sosial yang menjadi pusat identitas, kenangan, interaksi sosial, dan rasa aman. Pembangunan yang bertujuan untuk membangun kembali mengharuskan pendalaman konteks sosial untuk menstabilkan psikologis warga dan mendukung integrasi sosial kembali ke dalam masyarakat (Surtiari, 2019). Penanganan pascabencana yang berfokus pada pemulihan aset sosial dan psikologis sangat penting; rumah bisa menjadi ruang sosial yang membantu individu meredakan trauma dan mulai membangun kembali kehidupan mereka (Iskandar et al., 2024). Kegagalan dalam memulihkan aspek ini dapat menyebabkan keterasingan dan menghambat resiliensi komunitas dalam jangka panjang, meskipun infrastruktur fisik telah terbangun. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan konsep keterikatan tempat (*place attachment*) sebagai lensa analisis

utama untuk memahami dampak kemanusiaan dari kedua pendekatan rekonstruksi tersebut.

*Place attachment* atau keterikatan tempat adalah ikatan emosional antara individu dengan tempat tinggalnya, yang ditandai dengan identifikasi mereka terhadap tempat tersebut dan ketergantungan mereka padanya (Setiawan et al., 2023). Dalam pengertian yang lain, *place attachment* adalah ikatan emosional atau afektif yang positif antara seseorang dengan suatu tempat tertentu. Ikatan ini ditandai dengan kecenderungan orang tersebut untuk selalu ingin berada dekat dengan tempat itu (Boley et al., 2021). *Place attachment* tidak hanya mengukur rasa suka terhadap suatu tempat, tetapi mengungkap ikatan emosional, fungsional, dan sosial yang kompleks yang dimiliki seseorang dengan tempat tinggalnya. Meskipun faktor ekonomi dan sosial cenderung mendominasi pilihan perilaku, semakin banyak literatur yang menunjukkan bahwa keterikatan pada tempat memiliki banyak manfaat psikologis, yang mempengaruhi ketahanan masyarakat pascabencana (Qing et al., 2022).

Pentingnya keterikatan pada tempat juga didukung oleh Guzal-Dec and Zwolińska-Ligaj (2023), yang menemukan bahwa *place attachment* dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan selama masa krisis. Dinamika keterikatan pada tempat juga menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk kesiapsiagaan bencana. Wang et al. (2021) menyoroti hubungan antara keterikatan tempat dan kesiapsiagaan bencana rumah tangga, dengan menyatakan bahwa individu dengan keterikatan yang lebih kuat pada tempat mereka menunjukkan tingkat kesiapsiagaan yang lebih tinggi. Studi kasus di Indonesia juga menunjukkan bahwa kepuasan terhadap rumah dan keterikatan pada tempat (*place attachment*) berperan sebagai katalis dalam proses penyembuhan warga pascabencana (Ophiyandri, 2011). Penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas (*community-based*) dalam rekonstruksi lebih efektif mempertahankan keterikatan dan makna sosial tempat yang hilang (Ophiyandri et al., 2013).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif guna menjawab pertanyaan: "Bagaimana variasi pendekatan rekonstruksi perumahan (relokasi huntap vs. dana stimulan *in-situ*) memengaruhi pemulihan atau kerusakan keterikatan tempat (*place attachment*) pada komunitas penyintas likuifaksi yang berasal dari Dusun III Vou?" Melalui analisis mendalam terhadap pengalaman kedua kelompok masyarakat ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan kritis mengenai bagaimana kebijakan rekonstruksi pascabencana dapat dirancang secara lebih humanis dan efektif, dengan menempatkan pemulihan hubungan antara manusia dan tempatnya sebagai salah satu pilar utama keberhasilan.

## II. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif (Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih karena relevansinya yang tinggi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai makna, pengalaman, dan persepsi subjektif terkait keterikatan tempat (*place attachment*). Desain studi kasus komparatif memungkinkan dilakukannya eksplorasi yang kaya dan kontekstual terhadap dua kasus yang berbeda namun saling terkait:

- (1) Komunitas penyintas dari Dusun III Vou yang direlokasi ke Hunian Tetap (Huntap) Pombewe, dan
- (2) Komunitas penyintas dari dusun yang sama yang membangun kembali huniannya secara *in-situ*.

Dengan membandingkan kedua kasus ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana variasi pendekatan rekonstruksi secara distingtif memengaruhi pemulihan hubungan emosional antara manusia dan tempatnya. Metode penelitian kemudian terbagi menjadi dua tahapan, yakni:

### a. Tahapan Pengumpulan Data

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana partisipan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kriteria utama yang ditetapkan adalah: (1) narasumber merupakan Warga Terdampak Bencana (WTB) yang berasal dari Dusun III Vou dan terdampak langsung oleh likuifaksi tahun 2018; dan (2) narasumber merupakan penerima salah satu dari dua skema bantuan utama, yakni relokasi Huntap Pombewe atau dana stimulan *in-situ*. Wawancara mendalam dilakukan dengan total 11 narasumber, yang terbagi atas 7 narasumber dari komunitas relokasi Huntap dan 4 narasumber dari komunitas *in-situ*, untuk memastikan data yang terkumpul dapat merepresentasikan kedua pengalaman secara berimbang.

Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Warga Terdampak Bencana (WTB) dari kedua kelompok komunitas. Sifat semi-terstruktur dari wawancara memberikan ruang yang fleksibel untuk menggali narasi personal tentang kehilangan, adaptasi, dan makna 'rumah', yang merupakan data inti untuk analisis *place attachment*. Wawancara ini didukung oleh data dari observasi lapangan yang sistematis untuk menangkap konteks fisik dan sosial dari kedua lingkungan permukiman, serta studi dokumen yang relevan untuk memperkuat pemahaman kontekstual.

Untuk menjaga kerahasiaan dan mempermudah analisis komparatif, para narasumber dalam penelitian ini diidentifikasi menggunakan sistem pengkodean. Narasumber dari Kasus Komunitas Relokasi Huntap diberi kode A, diikuti dengan inisial atau sebutan unik (misalnya, A-A, A-B, dst.). Sementara itu, narasumber dari Kasus Komunitas *In-situ* diberi kode B (misalnya, B-A, B-B, dst.). Penggunaan kode ini memungkinkan pelacakan argumen antar dan di dalam kedua kelompok kasus secara sistematis.

#### b. Tahapan Analisis Data

Proses analisis data dilaksanakan melalui dua tahapan utama yang sistematis. Tahap pertama adalah analisis tematik di dalam masing-masing kasus (*within-case analysis*). Pada tahap ini, transkrip wawancara dan catatan lapangan dari setiap komunitas dianalisis secara terpisah untuk mengidentifikasi pola-pola makna. Proses ini melibatkan familiarisasi data, pengodean terbuka untuk menandai segmen-segmen yang relevan, dan pengembangan kode-kode tersebut menjadi tema-tema yang lebih besar dan koheren. Kerangka analisis penelitian ini secara langsung mengadopsi model dua dimensi *place attachment* yang fundamental dari Williams and Vaske (2003). Analisis akan difokuskan pada dua dimensi utama Ketergantungan Fungsional (*Place Dependence*) yang merujuk pada ketergantungan fungsional pada suatu tempat, dan Identitas Tempat (*Place Identity*) yang mencakup ikatan emosional dan simbolis. Dalam penelitian kualitatif ini, dimensi *Place Identity* akan dibedah lebih lanjut melalui beberapa sub-tema yang muncul dari data, termasuk otonomi, ikatan sosial, serta negosiasi antara rasa aman dan trauma.

### III. PAPARAN HASIL PENELITIAN

#### III.1 Profil Komparatif Komunitas Relokasi dan *In-situ*

Intervensi pemerintah pascabencana, yang menawarkan dua skema bantuan utama menciptakan sebuah "eksperimen alami" di mana satu komunitas yang berasal dari satu lingkungan harus menempuh dua jalur pemulihan yang kontras. Bentuk pendekatan rekonstruksi yang pertama yakni relokasi ke Hunian Tetap (Huntap) Pombewe. Komunitas ini merupakan kelompok warga yang menerima unit hunian jadi dari pemerintah dalam sebuah lingkungan perumahan yang sepenuhnya baru, terencana, dan modern. Lingkungan baru ini menawarkan keunggulan infrastruktur yang tidak dimiliki kampung asal mereka, seperti jalanan yang luas dan beraspal serta adanya penerangan jalan. Keputusan untuk menerima skema relokasi ini seringkali bersifat pragmatis dan terpaksa. Alasan utamanya adalah karena lokasi rumah mereka yang lama telah ditetapkan sebagai "zona merah" yang tidak lagi diizinkan untuk pembangunan, sehingga menerima huntap menjadi pilihan yang paling logis dan aman. Selain itu, beberapa warga

memilih huntap karena ingin menghindari kerumitan dan beban dalam mengelola proses pembangunan sendiri.



**Gambar 1.** Potret Lingkungan Hunian Tetap (Huntap) Pombewe

Bentuk pendekatan rekonstruksi yang kedua yakni rekonstruksi *in-situ* di Dusun III Vou. Komunitas ini terdiri dari para penyintas yang menerima bantuan dana stimulan dari pemerintah untuk membangun kembali hunian mereka di atas lahan yang sama atau di sekitar lokasi permukiman lama. Berbeda dengan kelompok relokasi, keputusan kelompok ini untuk tetap tinggal didasari oleh pertimbangan yang sangat kuat terkait keberlanjutan hidup dan ikatan sosial-ekonomi yang telah mengakar. Alasan yang paling dominan adalah untuk tetap dekat dengan sumber mata pencaharian utama mereka, yakni lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, ikatan keluarga, seperti keharusan untuk merawat orang tua yang tidak ingin pindah, juga menjadi faktor penentu yang signifikan dalam keputusan mereka untuk membangun kembali kehidupan di atas puing-puing kampung halaman mereka.



**Gambar 2.** Potret Lingkungan Dusun III Vou, Komunitas Penyintas Bantuan *In-situ*

Dua bentuk pendekatan rekonstruksi bantuan perumahan yang berbeda secara fundamental ini pada akhirnya menciptakan serangkaian pengalaman yang sangat kontras dalam hal hubungan fungsional, sosial, dan emosional warga dengan tempat tinggal mereka, yang akan dieksplorasi lebih lanjut pada bagian-bagian setelah ini. Meskipun literatur fundamental mengidentifikasi dua dimensi utama *place attachment* yakni *place dependence* dan *place identity* (Williams & Vaske, 2003), penelitian kualitatif ini menggunakan empat tema analisis yang lebih mendalam. Tema 'Ketergantungan Fungsional' secara langsung mengkaji dimensi *place dependence*, sementara tema 'Ikatan Sosial', 'Identitas Tempat dan Otonomi', serta 'Rasa Aman dan Trauma' digunakan

untuk membedah berbagai manifestasi dari *place identity* yang kompleks dalam konteks pascabencana.

**Tabel 1.** Matriks Perbandingan Temuan Keterikatan Tempat antara Komunitas Relokasi dan *In-situ*

Dimensi <i>Place attachment</i> .	Kasus A: Komunitas Relokasi (Huntap)	Kasus B: Komunitas <i>In-situ</i> (Vou)
Ketergantungan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan dengan lahan pertanian terputus total atau menjadi beban komutasi harian.</li> <li>• Mendorong transformasi profesi dari petani menjadi buruh bangunan atau pekerja serabutan.</li> <li>• Kehilangan ruang untuk aktivitas produktif tambahan seperti beternak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mata pencaharian menjadi alasan dan "jangkar" utama untuk tetap tinggal dan menolak relokasi.</li> <li>• Memungkinkan keberlanjutan identitas agraris dan akses yang tidak terputus ke sumber kehidupan.</li> </ul>
Identitas Tempat dan Otonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas tempat baru dikaitkan dengan keunggulan infrastruktur modern (jalan beraspal, penerangan).</li> <li>• Rasa kepemilikan rendah akibat kualitas bangunan yang buruk dan proses "terima kunci" yang minim otonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki otonomi tinggi dalam proses membangun kembali, mulai dari memilih tukang hingga mengelola anggaran.</li> <li>• Proses membangun secara aktif menumbuhkan rasa kepemilikan, kepuasan, dan kebanggaan yang kuat.</li> </ul>
Ikatan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi fragmentasi ikatan komunitas lama akibat lingkungan yang heterogen dan kesibukan bekerja di luar huntap.</li> <li>• Terbentuk reformasi sosial berupa penguatan ikatan kekerabatan yang terkonsentrasi di satu lokasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikatan sosial dengan tetangga dan kerabat lama berhasil dipertahankan dan menjadi jaring pengaman emosional.</li> <li>• Ikatan keluarga menjadi faktor penentu yang signifikan dalam keputusan untuk tetap tinggal.</li> </ul>
Rasa Aman dan Trauma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa aman dan terbebas dari trauma lingkungan (ketakutan akan terulangnya bencana alam).</li> <li>• Muncul kerentanan dan rasa was-was baru terhadap ancaman sosial seperti pencurian di lingkungan yang heterogen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus hidup berdampingan dengan lanskap yang terluka dan kenangan traumatik akan bencana (<i>place trauma</i>).</li> <li>• Merasakan keamanan sosial yang tinggi karena berada di lingkungan yang familiar dan kohesif.</li> </ul>

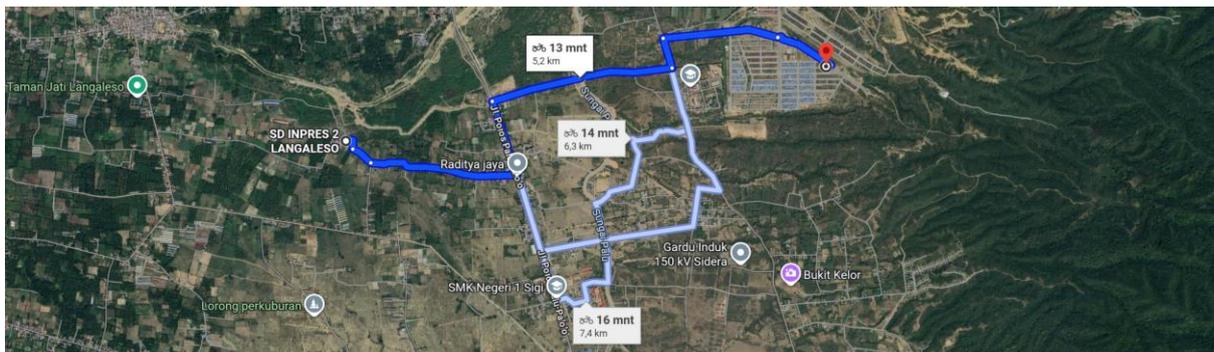
### III.2 Ketergantungan Fungsional (*Place Dependence*)

Dalam konteks komunitas agraris seperti masyarakat Dusun III Vou, keterikatan tempat (*place attachment*) tidak hanya dibentuk oleh kenangan atau ikatan sosial, tetapi juga secara fundamental oleh ketergantungan fungsional terhadap lahan sebagai ruang produksi dan sumber utama mata pencaharian. Lahan garapan, sawah, dan kebun bukan sekadar aset ekonomi, melainkan perpanjangan dari identitas dan ritme kehidupan sehari-hari. Analisis komparatif antara komunitas relokasi dan *in-situ* menunjukkan bagaimana kedua skema rekonstruksi secara drastis dan berbeda telah memengaruhi ikatan fungsional ini, yang pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam pengalaman pemulihan mereka.



**Gambar 3.** Posisi Lokasi Studi Komunitas *In-situ* (Dusun III Vou) dan Komunitas Relokasi (Blok H, Hunian Tetap Pombewe)

Sumber: Diolah dari Citra Satelit Google Earth, 2025



**Gambar 4.** Alternatif Akses dari Dusun III Vou menuju Hunian Tetap Pombewe

Sumber: Diolah dari Citra Satelit Google Earth, 2025

Pada kelompok relokasi, perpindahan fisik ke Huntap Pombewe secara langsung menyebabkan disrupsi masif terhadap ketergantungan fungsional ini. Bagi sebagian warga, relokasi berarti pemutusan total hubungan mereka dengan dunia pertanian. Narasumber A-A, yang sebelumnya adalah seorang petani, dengan tegas menyatakan, "*Kalau bagi saya putus total kalau pertanian, kalau bagi saya*". Ia kini harus beralih profesi menjadi pekerja serabutan yang tidak lagi terikat pada lahan di kampung halamannya. Transformasi serupa dialami oleh Narasumber A-B, yang sebelum bencana bekerja menanam padi di sawah milik orang tuanya di Vou, namun setelah pindah ke huntap beralih profesi menjadi tukang bangunan.

Bagi warga lain yang berusaha mempertahankan lahan mereka, relokasi mengubah mereka menjadi komuter harian. Narasumber A-C menggambarkan rutinitas barunya dengan frasa "*pagi turun malam naik*", sebuah perjalanan bolak-balik antara huntap dan kebun di Vou yang, meskipun ia maknai secara positif sebagai bentuk rekreasi, secara objektif menambah beban waktu, biaya, dan energi. Beban ini juga dirasakan oleh Narasumber A-B yang setiap hari harus mengantar anaknya bersekolah di Vou, sebuah keputusan yang ia ambil demi menjaga

silaturahmi dengan orang tuanya, namun secara praktis menambah kompleksitas dalam mobilitas hariannya. Lebih jauh lagi, lingkungan huntap yang terencana dan padat menghilangkan ruang untuk aktivitas produktif subsisten lainnya. Narasumber A-B dan Narasumber A-C sama-sama menyoroti ketidakmungkinan untuk beternak di huntap, sebuah aktivitas yang sebelumnya menjadi bagian penting dari strategi ekonomi rumah tangga mereka.

Sebaliknya, pada kelompok *in-situ*, keterikatan fungsional justru menjadi alasan utama bagi para WTB untuk menolak pilihan relokasi. Keputusan mereka untuk bertahan di tengah lanskap yang telah hancur didorong oleh kesadaran bahwa keberlangsungan hidup mereka terikat erat pada lokasi tersebut. Narasumber B-A merangkul sentimen ini dengan sangat jelas saat menjelaskan alasannya menolak huntap: "*Kalau kita nae ke huntap, kerjaannya kita disini. Kesana kemari... Kerjanya kita disini. Mata pencahariannya kita lalu disini*". Pernyataan ini diperkuat oleh Narasumber B-B yang juga menolak tawaran relokasi dengan alasan serupa, "*Sa bilang tetap disini. Karena apa, mata pencaharian disini*". Bahkan bagi Narasumber B-C, keputusan untuk tetap tinggal juga dipengaruhi oleh profesi suaminya sebagai seorang petani di Vou. Bagi komunitas ini, jarak adalah ancaman eksistensial, dan tetap tinggal adalah satu-satunya cara untuk memastikan akses yang tidak terputus ke sumber kehidupan mereka.

Secara komparatif, temuan dari kedua kasus ini menunjukkan dengan jelas bagaimana dua kebijakan rekonstruksi menghasilkan dampak yang sangat berbeda terhadap pilar utama *place attachment* di komunitas agraris. Skema relokasi, meskipun berhasil menyediakan hunian yang aman dan modern, secara fundamental telah memutuskan atau merenggangkan ikatan fungsional yang paling vital bagi para WTB yang basis kehidupannya masih bergantung pada sektor agraris. Proses ini tidak hanya mengubah status mereka dari produsen yang menetap menjadi komuter atau pekerja serabutan, tetapi juga menggerus identitas mereka yang terikat pada lahan. Sebaliknya, skema dana stimulan *in-situ*, terlepas dari berbagai tantangan dan ketidakpuasan dalam implementasinya, berhasil mempertahankan ikatan fungsional ini. Kemampuan untuk tetap dekat dengan lahan garapan menjadi "jangkar" yang menahan mereka di tempat, memungkinkan keberlanjutan mata pencaharian, dan menjadi fondasi utama bagi upaya mereka membangun kembali kehidupan di atas puing-puing kampung halaman.

### III.3 Identitas Tempat (*Place Identity*)

Jika ketergantungan fungsional menjelaskan ikatan pragmatis antara manusia dan tempat, maka dimensi ini akan menggali hubungan yang lebih dalam dan bersifat emosional. Dimensi ini melampaui sekadar fungsi sebuah lokasi dan menyentuh bagaimana sebuah tempat secara simbolis menjadi bagian dari definisi diri, kenangan, dan makna hidup seseorang (Williams & Vaske, 2003). Dalam konteks pemulihan pascabencana, pemahaman terhadap *place identity* menjadi krusial karena ia membedakan antara sekadar penyediaan 'bangunan' (*house*) sebagai struktur fisik dan pemulihan makna 'rumah' (*home*) sebagai ruang psiko-sosial. Analisis kualitatif terhadap pengalaman komunitas Dusun III Vou menyingkap bahwa dimensi identitas tempat ini bersifat sangat kompleks dan termanifestasi melalui beberapa sub-tema sentral. Oleh karena itu, bagian ini akan membedah secara mendalam bagaimana *place identity* dinegosiasikan oleh kedua kelompok penyintas melalui tiga lensa analisis: (1) otonomi dan rasa kepemilikan dalam proses rekonstruksi; (2) jaringan ikatan sosial; serta (3) negosiasi antara trauma dan pencarian rasa aman.

#### III.3.1 Otonomi dan Rasa Kepemilikan dalam Proses Rekonstruksi

Selain ketergantungan fungsional pada lahan, pilar fundamental lain dari keterikatan tempat adalah identitas tempat itu sendiri, dimana jaringan hubungan dengan keluarga, tetangga, dan komunitas yang lebih luas yang membentuk ikatan sosial dengan rasa aman dan dukungan emosional. Pemulihan pascabencana tidak hanya sekadar mengganti struktur fisik yang hilang, tetapi juga tentang membangun kembali makna 'rumah' (*home*), sebuah ruang yang sarat dengan

identitas, keamanan psikologis, dan rasa memiliki. Proses untuk mencapai hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat otonomi dan keterlibatan penyintas dalam rekonstruksi hunian mereka. Analisis komparatif antara kedua kasus di Dusun III Vou secara tajam mengilustrasikan perbedaan fundamental antara sekadar menerima 'bangunan' (*house*) dan secara aktif membangun kembali 'rumah' (*home*).

Pada kasus komunitas yang direlokasi, para penyintas menerima unit hunian jadi melalui skema "terima kunci" yang meminimalkan keterlibatan mereka. Di satu sisi, lingkungan baru di Huntap Pombewe menawarkan identitas tempat yang modern dan teratur, yang diapresiasi oleh sebagian warga. Narasumber A-G, misalnya, secara positif membandingkan fasilitas di huntap dengan kondisi di kampung lamanya: "*Kita merasa senang kok di sini, krena kita punya jalannya luas, diaspal, punya penerangan juga toh, lampu jalan. Kalau di bawah kan tidak ada, kek macam di hutan*". Namun, identitas modern ini seringkali dibayangi oleh rasa kepemilikan yang rendah akibat kualitas bangunan yang mengecewakan. Banyak warga mengeluhkan kerusakan yang sudah ada sejak awal mereka menempati hunian. Narasumber A-B menggambarkan kualitas konstruksi sebagai "*banyak ta pela-pela*" atau tidak rapi dan sudah retak-retak, sentimen yang juga diungkapkan oleh Narasumber A-C yang menyatakan bahwa rumahnya "*baru ditempati sudah begini, dengan lantainya begini*". Proses penerimaan pasif ini, ditambah dengan kualitas yang dipertanyakan, cenderung menempatkan warga sebagai objek intervensi, bukan subjek yang berdaya. Hunian yang mereka terima adalah sebuah 'bangunan' fungsional yang disediakan oleh pihak eksternal, bukan 'rumah' yang lahir dari proses dan pilihan personal.



**Gambar 5.** Potret Kerusakan pada Rumah WTB di Huntap Pombewe

Sebaliknya, pada komunitas *in-situ*, meskipun dihadapkan pada sumber daya yang terbatas dan proses yang penuh tantangan, warga memiliki otonomi yang tinggi dalam membangun kembali hunian mereka. Proses ini memungkinkan mereka untuk secara aktif menanamkan identitas dan makna ke dalam struktur fisik rumah mereka. Otonomi ini terlihat jelas dari pernyataan Narasumber B-D, "*Kita. Kita yang sewa tukang*", yang menunjukkan adanya kontrol penuh atas proses pembangunan. Rasa kepemilikan yang kuat ini melahirkan kepuasan yang mendalam, seperti yang diungkapkannya dengan antusias, "*Iyo. Alhamdulillah puas*". Lebih jauh lagi, otonomi dalam mengelola dana stimulan memungkinkan warga untuk berkreasi dan memaksimalkan hasil sesuai kebutuhan mereka. Narasumber B-C menunjukkan kebanggaan yang luar biasa karena berhasil membangun lebih dari sekadar rumah inti dengan dana 50 juta rupiah, mencakup teras dan dapur, sebuah pencapaian yang ia anggap sebagai bukti kemampuannya dalam mengelola dana secara efisien. Proses aktif ini, mulai dari memilih tukang, mendesain, hingga mengelola anggaran, adalah sebuah tindakan penegasan kembali kontrol atas kehidupan mereka yang sempat hancur.

Secara komparatif, kedua pengalaman ini menyoroti sebuah dikotomi krusial. Skema relokasi cenderung menyediakan 'bangunan' yang fungsional, aman, dan modern, namun berisiko menciptakan keterasingan karena minimnya keterlibatan personal dan kualitas yang seringkali tidak sesuai harapan. Rasa kepemilikan menjadi lemah karena hunian tersebut adalah produk dari pihak lain. Di sisi lain, skema dana stimulan *in-situ* memberikan kesempatan bagi warga untuk secara aktif 'membangun rumah' mereka. Proses yang penuh otonomi ini, meskipun sulit, sarat dengan makna, identitas, dan kerja keras, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa kepemilikan dan keterikatan tempat yang jauh lebih kuat. Temuan ini menegaskan bahwa dalam pemulihan pascabencana, proses rekonstruksi itu sendiri sama pentingnya dengan hasil akhirnya; memberikan otonomi kepada penyintas adalah kunci untuk membantu mereka membangun kembali tidak hanya struktur fisik, tetapi juga makna dan martabat.

### III.3.2 Jaringan Ikatan Sosial

Bencana likuifaksi tidak hanya menghancurkan struktur fisik, tetapi juga mengancam tatanan sosial yang telah lama terbangun. Analisis komparatif menunjukkan bagaimana kedua skema rekonstruksi secara signifikan membentuk ulang lanskap sosial komunitas Dusun III Vou, menghasilkan dua pola yang sangat berbeda: fragmentasi dan reformasi jaringan di satu sisi, serta preservasi dan keberlanjutan di sisi lain. Pada kelompok yang direlokasi, perpindahan ke Huntap Pombewe memicu fragmentasi ikatan komunitas lama sekaligus mendorong reformasi jaringan sosial yang lebih terkonsentrasi pada ikatan kekerabatan. Lingkungan huntap yang heterogen, di mana warga Dusun III Vou kini bertetangga dengan WTB dari desa lain, serta kesibukan bekerja di luar, menyulitkan terpeliharanya kohesi komunitas seperti sedia kala. Narasumber A-C menyoroti tantangan ini dengan menyatakan, "*Kita maklumi juga karena, ya hampir semua warga huntap ini kerja pulang malam. Jadi butuh waktu istirahat begitu toh. Makanya kurang kayak ada diskusi-diskusi itu*". Akibatnya, lingkungan huntap seringkali terasa sunyi di siang hari, menandakan melemahnya interaksi komunal spontan yang dulu menjadi ciri khas kehidupan di kampung. Namun, di tengah fragmentasi ini, terjadi sebuah reformasi sosial yang menarik: penguatan ikatan kekerabatan. Relokasi secara tidak langsung telah mengelompokkan keluarga-keluarga inti dan kerabat dekat dalam satu blok hunian. Narasumber A-D merasakan manfaat dari fenomena ini, "*Sering silaturahmi, karena ade kandung semua di huntap semua*". Narasumber A-B juga menegaskan bahwa sebagian besar tetangganya di huntap adalah keluarganya sendiri. Pola ini menunjukkan bahwa ketika ikatan komunitas yang lebih luas melemah, para penyintas cenderung memperkuat jaringan sosial terdekat mereka, yaitu keluarga, sebagai mekanisme adaptasi utama di lingkungan yang baru dan asing.

Sebaliknya, pada kelompok menetap (*in-situ*), keputusan untuk tetap tinggal memungkinkan preservasi dan keberlanjutan ikatan sosial yang telah ada sebelum bencana. Bagi komunitas ini, jaringan sosial yang utuh bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi salah satu alasan utama untuk bertahan. Pilihan untuk menolak relokasi seringkali didasari oleh keinginan untuk tetap dekat dengan keluarga yang juga memilih untuk tinggal. Narasumber B-C memberikan contoh yang kuat mengenai hal ini, di mana keputusannya untuk membangun kembali di Vou secara langsung dipengaruhi oleh tanggung jawabnya merawat orang tua yang tidak mau pindah. Berada di tengah-tengah tetangga dan kerabat yang sudah dikenal memberikan rasa aman secara sosial yang tidak dapat ditawarkan oleh lingkungan baru. Meskipun lanskap fisik telah berubah drastis, keberlanjutan interaksi dengan orang-orang yang sama membantu mereka mempertahankan rasa sebagai satu komunitas "Dusun III Vou" yang utuh.

Secara komparatif, kedua kasus ini menggambarkan bagaimana intervensi rekonstruksi dapat secara fundamental mengubah struktur sosial sebuah komunitas. Skema relokasi, dengan memindahkan warga ke lingkungan yang heterogen dan jauh dari pusat kehidupan lama, cenderung melemahkan ikatan komunitas yang lebih luas (*community belonging*) namun secara tidak sengaja dapat memperkuat ikatan kekerabatan (*kinship network*) sebagai benteng

pertahanan sosial. Di sisi lain, skema *in-situ* terbukti efektif dalam mempertahankan kohesi sosial yang sudah ada, di mana jaringan tetangga dan keluarga yang familiar menjadi jaring pengaman emosional yang krusial dalam proses pemulihan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan dimensi sosial dalam perencanaan rekonstruksi, karena kemampuan sebuah komunitas untuk pulih tidak hanya bergantung pada kualitas hunian fisik, tetapi juga pada kekuatan dan keberlanjutan jaringan sosial yang menopangnya.

### III.5 Negosiasi antara Trauma dan Pencarian Rasa Aman

Pemulihan pascabencana secara inheren merupakan sebuah proses negosiasi yang kompleks antara rasa aman dan trauma. Bagi para penyintas, keterikatan pada suatu tempat tidak hanya dibentuk oleh kenangan positif, tetapi juga oleh ingatan traumatik terhadap bencana yang pernah terjadi. Pilihan antara relokasi dan rekonstruksi *in-situ* pada dasarnya adalah pilihan antara dua strategi yang berbeda dalam mengelola trauma dan membangun kembali rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis. Analisis komparatif terhadap kedua kasus ini menyingkap bagaimana masing-masing jalur pemulihan menawarkan bentuk keamanan yang berbeda, namun di saat yang sama juga memunculkan kerentanan yang baru.

Pada komunitas yang direlokasi, keuntungan psikologis terbesar yang dirasakan oleh para penyintas adalah terbebasnya mereka dari trauma lingkungan (*environmental trauma*). Dengan pindah ke Huntap Pombewe yang secara geografis lebih tinggi dan aman, mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan terulangnya bencana. Pengalaman ini diartikulasikan dengan sangat kuat oleh Narasumber A-E, yang menggambarkan rasa cemas saat tinggal di lokasi lama: "...kalau macam tinggal di bawah itu, kalau musim hujan, paling ada ketakutan lah. Karena sudah kita rasakan 2018 toh". Rasa aman yang baru ia temukan di huntap menjadi sebuah kelegaan yang mendalam: "Kalau disini, sudah, biar deras bagaimana, aman sudah". Relokasi, dalam hal ini, berhasil menyediakan keamanan fisik dari ancaman alam dan menyembuhkan luka psikologis yang terikat pada lokasi bencana. Namun, keamanan fisik ini harus dibayar dengan munculnya kerentanan sosial yang baru. Beberapa narasumber, seperti Narasumber A-F, mengeluhkan maraknya pencurian di lingkungan huntap yang lebih terbuka dan heterogen. Artinya, rasa aman dari ancaman alam ditukar dengan rasa was-was terhadap ancaman sosial dari "orang luar".

Sebaliknya, pada komunitas *in-situ*, para penyintas secara sadar memilih untuk hidup berdampingan dengan lanskap yang terluka dan penuh dengan pemicu trauma. Mereka membangun kembali rumah di atas tanah yang pernah menelan hunian mereka sebelumnya. Narasumber B-C, misalnya, masih dapat mendeskripsikan dengan jelas bagaimana lumpur likuifaksi menenggelamkan rumahnya hingga sepinggang. Keputusan untuk tinggal berarti mereka harus terus-menerus bernegosiasi dengan trauma tempat (*place trauma*) ini. Namun, di tengah kerentanan fisik ini, mereka menemukan bentuk keamanan yang lain, yaitu keamanan sosial. Berada di lingkungan yang sangat familiar, dikelilingi oleh tetangga yang sudah dikenal selama bertahun-tahun, memberikan rasa aman yang kuat. Ketika ditanya mengenai keamanan, Narasumber B-D dengan yakin menjawab "Aman" dan menegaskan bahwa tidak pernah ada kasus pencurian di lingkungan mereka. Keamanan ini lahir dari kohesi sosial dan rasa saling percaya yang telah terbangun lama, sebuah kemewahan yang tidak selalu dirasakan oleh warga di lingkungan huntap yang baru.

Secara komparatif, kedua kasus ini menyoroti sebuah dilema fundamental dalam pemulihan pascabencana. Skema relokasi terbukti efektif dalam memberikan keamanan dari ancaman alam, membebaskan penyintas dari ketakutan akan terulangnya bencana, yang merupakan langkah penting dalam pemulihan psikologis. Namun, proses ini berisiko menciptakan kerentanan sosial baru di lingkungan yang asing. Di sisi lain, skema *in-situ* berhasil mempertahankan keamanan yang bersumber dari ikatan sosial yang kuat dan familiaritas lingkungan, yang juga merupakan

elemen krusial bagi kesejahteraan psikologis. Akan tetapi, hal ini memaksa para penyintas untuk terus hidup berdampingan dengan memori dan sisa-sisa fisik dari trauma bencana. Temuan ini menggarisbawahi bahwa konsep "rasa aman" pascabencana bersifat multidimensional, dan kebijakan rekonstruksi yang efektif harus mampu menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan fisik dari ancaman lingkungan dengan pentingnya keamanan psikologis yang ditawarkan oleh ikatan sosial yang utuh.

#### **IV. PEMBAHASAN UMUM DAN IMPLIKASI**

Analisis komparatif terhadap dua jalur pemulihan yang ditempuh oleh komunitas Dusun III Vou menyingkap sebuah narasi yang kompleks dan multidimensional mengenai keterikatan tempat (*place attachment*) pascabencana. Temuan-temuan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun skema rekonstruksi yang superior secara absolut; sebaliknya, setiap pendekatan menawarkan serangkaian keuntungan dan kerugian yang secara fundamental membentuk kembali hubungan para penyintas dengan tempat tinggal, mata pencaharian, dan komunitas mereka. Bagian ini akan membahas implikasi dari temuan-temuan tersebut, baik secara teoretis bagi studi *place attachment* maupun secara praktis bagi perumusan kebijakan pemulihan pascabencana di masa depan.

##### **IV.1 Sintesis Temuan**

Temuan utama dari penelitian ini adalah adanya dilema fundamental yang dihadapi para penyintas, yang dipicu oleh dua pilihan kebijakan yang berbeda. Skema relokasi ke Huntap Pombewe (Kasus A) terbukti berhasil menyediakan keamanan fisik dan psikologis dari trauma lingkungan. Namun, keamanan ini harus ditebus dengan harga yang mahal yakni tercerabutnya mereka dari akar sosio-ekonomi. Relokasi secara drastis memutus atau menyulitkan akses terhadap lahan produktif, yang merupakan manifestasi dari dimensi *place dependence*. Proses ini juga memfragmentasi ikatan komunitas dan memunculkan kerentanan sosial baru, yang mengganggu berbagai aspek dari *place identity* mereka. Di sisi lain, skema dana stimulan *in-situ* (Kasus B) berhasil mempertahankan keberlanjutan sosio-ekonomi dan kohesi sosial. Kemampuan untuk tetap dekat dengan lahan garapan menjadi jangkar dari *place dependence* mereka. Otonomi dalam membangun kembali juga memperkuat *place identity* melalui rasa kepemilikan yang kuat. Namun, keuntungan ini datang dengan keharusan untuk hidup berdampingan dengan lanskap yang terluka dan kenangan traumatik akan bencana, serta perasaan ketidakpuasan terkait proses bantuan.

##### **IV.2 Implikasi Teoretis**

Temuan dari studi kasus ini memberikan beberapa nuansa penting bagi literatur *place attachment*, khususnya dalam konteks pascabencana di wilayah pedesaan agraris. Pertama dan yang paling utama, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis yang mengancam keberlanjutan hidup, dimensi ketergantungan fungsional (*place dependence*) seringkali menjadi faktor yang paling dominan dalam pengambilan keputusan. Keputusan mayoritas warga *in-situ* untuk menolak relokasi, meskipun ditawarkan hunian yang lebih aman, hampir secara universal didasarkan pada pertimbangan mata pencaharian. Hal ini dapat dijelaskan secara teoretis melalui perspektif resiliensi mata pencaharian (*livelihood resilience*). Bagi komunitas agraris dengan tingkat diversifikasi ekonomi yang rendah seperti di Dusun III Vou, akses langsung dan tanpa hambatan terhadap aset produktif, dalam hal ini lahan garapan, merupakan fondasi utama dari strategi bertahan hidup mereka. Dalam kondisi seperti ini, ketergantungan fungsional bukan lagi sekadar salah satu dimensi keterikatan, melainkan menjadi sebuah prasyarat eksistensial. Pilihan untuk tetap tinggal di lokasi yang secara fisik rentan menjadi sebuah kalkulasi rasional di mana keamanan ekonomi jangka panjang lebih diutamakan daripada keamanan fisik sesaat yang ditawarkan oleh lokasi relokasi yang secara ekonomi steril. Dengan demikian, temuan ini menggarisbawahi bahwa analisis *place attachment* pascabencana pada komunitas dengan tingkat pendapatan yang bergantung pada sumber daya alam harus secara eksplisit

memberatkan bobot pada dimensi fungsional-ekonomi, karena ia seringkali menjadi fondasi bagi pembentukan dimensi-dimensi lainnya.

Kedua, temuan ini berkontribusi pada literatur mengenai modal sosial dan resiliensi komunitas. Intervensi relokasi, dengan memisahkan warga dari jaringan tetangga yang sudah ada, berisiko mengikis modal sosial yang justru krusial untuk pemulihan kolektif. Sebaliknya, pendekatan *in-situ* terbukti lebih efektif dalam mempertahankan kohesi sosial, menunjukkan bahwa kebijakan rekonstruksi yang berhasil harus mampu melindungi, bukan merusak, tatanan sosial yang ada. Selanjutnya, penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bagi teori pembuatan rumah (*home-making*) dan agensi. Perbedaan tajam antara pengalaman membangun 'rumah' pada kelompok *in-situ* dan menerima 'bangunan' pada kelompok relokasi menunjukkan bahwa otonomi dalam proses rekonstruksi merupakan mekanisme fundamental untuk memulihkan *place identity*. Proses yang partisipatif memungkinkan penyintas untuk menanamkan kembali makna dan kontrol atas ruang hidup mereka.

Terakhir, penelitian ini menambah nuansa pada konsep trauma tempat dan rasa aman. Temuan mengenai dilema antara keamanan fisik (di huntap) dan keamanan sosial (di Vou) mengilustrasikan bahwa rasa aman pascabencana tidaklah monolitik. Kebijakan rekonstruksi seringkali menciptakan sebuah *trade-off* antara pemulihan dari trauma lingkungan dan pemeliharaan rasa aman yang bersumber dari familiaritas dan dukungan sosial, sebuah pertimbangan krusial yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan pemulihan yang lebih humanis.

### IV.3 Implikasi Kebijakan

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang signifikan bagi para perencana dan pelaksana program pemulihan pascabencana. Kegagalan dan keberhasilan parsial dari kedua skema menunjukkan bahwa pendekatan biner "relokasi atau *in-situ*" adalah sebuah penyederhanaan yang tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas kebutuhan penyintas. Kebijakan di masa depan perlu bergerak menuju model yang lebih inklusif, fleksibel, dan sensitif terhadap konteks sosio-ekonomi. Pertama, untuk skema relokasi, penyediaan hunian fisik saja tidaklah cukup. Program relokasi harus diintegrasikan secara holistik dengan program pemulihan mata pencaharian yang terencana dengan baik. Janji-janji penyediaan lahan garapan atau kandang ternak yang tidak terealisasi, seperti yang dikeluhkan warga huntap, menciptakan ketidakpercayaan dan menghambat pemulihan jangka panjang.

Kedua, untuk skema *in-situ*, meskipun berhasil mempertahankan mata pencaharian, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, keadilan, dan pendampingan teknis dalam penyaluran dana stimulan. Keluhan mengenai ketidakmerataan bantuan dan kesulitan dalam mengelola dana yang terbatas menunjukkan adanya kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih baik dan pendampingan yang lebih intensif. Pada akhirnya, tujuan dari intervensi pascabencana bukanlah sekadar membangun kembali rumah, melainkan membangun kembali kehidupan. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang menempatkan keberlanjutan mata pencaharian dan pemulihan ikatan sosial sebagai prioritas yang setara dengan penyediaan hunian fisik.

## V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana variasi pendekatan rekonstruksi perumahan pascabencana, yakni skema relokasi melalui Hunian Tetap (HunTap) dan skema dana stimulan *in-situ*, memengaruhi pemulihan keterikatan tempat (*place attachment*) pada komunitas penyintas likuifaksi dari Dusun III Vou, Sulawesi Tengah. Kesimpulan yang ditarik dari analisis komparatif menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pendekatan yang superior secara absolut; sebaliknya, setiap skema menawarkan serangkaian konsekuensi yang berbeda dan seringkali bertolak belakang terhadap dimensi fungsional, sosial, dan psikologis para penyintas.

Temuan ini selaras dengan argumen dalam studi komparatif bahwa konteks lokal secara mendalam membentuk hasil dari sebuah intervensi, sehingga mustahil untuk menemukan satu model solusi yang berlaku universal (Bartlett & Vavrus, 2017). Skema relokasi ke Huntap Pombewe terbukti berhasil memulihkan rasa aman dari trauma lingkungan dan menyediakan infrastruktur fisik yang modern, namun keberhasilan ini harus dibayar dengan tercerabutnya komunitas dari akar sosio-ekonomi mereka. Terputusnya akses terhadap lahan produktif secara signifikan telah mengganggu keberlanjutan mata pencaharian dan melemahkan ikatan komunitas yang lebih luas. Di sisi lain, skema dana stimulan *in-situ* berhasil mempertahankan fondasi fungsional dan kohesi sosial yang menjadi inti dari resiliensi komunitas. Otonomi dalam proses membangun kembali juga menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat. Akan tetapi, keuntungan ini datang dengan keharusan bagi para penyintas untuk terus hidup berdampingan dengan lanskap yang terluka dan kenangan traumatik akan bencana. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pilihan kebijakan rekonstruksi pascabencana bukanlah sekadar pilihan teknis, melainkan sebuah keputusan yang secara fundamental membentuk ulang nasib dan makna kehidupan para penyintas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditujukan bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana program pemulihan di masa depan. Pertama, perlu adanya pergeseran dari pendekatan biner "relokasi atau *in-situ*" menuju model yang lebih fleksibel dan holistik. Untuk program relokasi, penyediaan unit hunian fisik tidak boleh berhenti sebagai tujuan akhir. Intervensi ini harus diintegrasikan secara erat dengan program pemulihan mata pencaharian yang terencana, realistis, dan berkelanjutan untuk memitigasi dampak dislokasi ekonomi. Untuk program *in-situ*, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, keadilan dalam distribusi bantuan, serta menyediakan pendampingan teknis dan psikososial yang lebih intensif untuk membantu warga tidak hanya membangun kembali rumah, tetapi juga mengelola trauma tempat yang mereka hadapi. Pada intinya, kebijakan pemulihan harus menempatkan keberlanjutan kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, sebagai prioritas yang setara dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Fokus studi kasus pada satu komunitas spesifik, yakni warga Dusun III Vou, membuat temuan ini kaya akan konteks namun memiliki keterbatasan dalam generalisasi. Pengalaman komunitas lain dengan karakteristik sosio-ekonomi yang berbeda mungkin akan menghasilkan dinamika yang berbeda pula. Selain itu, sifat penelitian yang kualitatif memberikan kedalaman pemahaman namun tidak dapat mengukur dampak secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sangat direkomendasikan untuk mengkaji isu ini dalam skala yang lebih luas, misalnya dengan melakukan studi kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi jangka panjang dari kedua skema bantuan terhadap tingkat pendapatan dan kemiskinan. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk melacak bagaimana keterikatan tempat pada komunitas yang direlokasi berevolusi seiring berjalannya waktu, apakah ikatan baru yang lebih kuat dapat terbentuk, atau apakah perasaan keterasingan akan terus berlanjut lintas generasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, A., & Lumbaa, Y. (2024). Kehancuran dan Harapan Baru: Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah 2018. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 252-259.
- Bahri, S. (2024). Transmisi Informasi Kebencanaan Dalam Penerapan Kebijakan Relokasi Pasca Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Di Palu Sulawesi Tengah: Transmission Of Disaster Information In

- Implementing Relocation Policies After The Earthquake, Tsunami And Liquefaction In Palu, Central Of Sulawesi. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 79-99.
- Bartlett, L., & Vavrus, F. (2017). Comparative Case Studies. *Educação & Realidade*, 42, 899-920. <https://doi.org/10.1590/2175-623668636>
- Boley, B. B., Strzelecka, M., Yeager, E. P., Ribeiro, M. A., Aleshinloye, K. D., Woosnam, K. M., & Mimbs, B. P. (2021). Measuring *place attachment* with the Abbreviated *Place attachment* Scale (APAS). *Journal of Environmental Psychology*, 74, 101577. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101577>
- Elintia, E., Widodo, P., Saragih, H., & Kusuma, K. (2024). Rehabilitation and Reconstruction Post-Earthquake, Tsunami and Liquefaction Disaster in Central Sulawesi Province. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 4. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i1.1201>
- Guzal-Dec, D. J., & Zwolińska-Ligaj, M. A. (2023). How to Deal with Crisis? *Place attachment* as a Factor of Resilience of Urban-Rural Communes in Poland during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 15(7), 6222. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6222>
- Husain, S. (2022). Peran Japan International Cooperation Agency (Jica) Pasca Bencana Alam 2018 Di Sulawesi Tengah. *Spektrum*, 19(2), 1-16. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v19i2.6660>
- Hutabarat, L. E., Simanjuntak, P., & Tampubolon, S. P. (2019). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan bangunan dan lingkungan pasca gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu Sulawesi Tengah. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 208-222.
- Iskandar, I., Taufiqurokhman, T., & Satispi, E. (2024). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pascabencana Gempa Bumi : Studi Pada LKSA Budi Luhur Kabupaten Cianjur. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1740>
- Iswari, M. F. (2020). Kegawatdaruratan Psikologis Berupa Tingkat Stres, Kecemasan dan Depresi Korban Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Wilayah Pantoloan Kabupaten Donggala Palu Sulawesi Tengah. *Master Medika*, 8(1), 46-52. <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v8i1.377>
- Ophiyandri, T. (2011). Community-Based Post-Disaster Housing Reconstruction: Examples from Indonesia. *Post-Disaster Reconstruction of the Built Environment: Rebuilding for Resilience*, 91-116.
- Ophiyandri, T., Amaratunga, P., Pathirage, C., & Keraminiyage, K. (2013). Critical success factors for community-based post-disaster housing reconstruction project (CPHRP) in pre-construction stage in Indonesia. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 4. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-03-2013-0005>
- Qing, C., Guo, S., Deng, X., Wang, W., Song, J., & Xu, D. (2022). Stay in Risk Area: *Place attachment*, Efficacy Beliefs and Risk Coping. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4), 2375. <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/4/2375>
- Samad, A., Erdiansyah, & Wulandari, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana di Sulawesi Tengah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 15-24. <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v8i1.377>
- Sembiring, N. W., Manurung, R., & Aulia, D. N. (2016). Makna Rumah Tinggal Bagi Penghuni Dan Implementasinya Pada Perumahan Terencana Di Kota Medan. *Prosiding Seminar Kearifan Lokal dan Lingkungan Binaan*, 378-392. <https://seminararsitekturilingkunganbinaan.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/prosiding-seminar-nasional-lingkungan-binaan-2016.pdf>
- Setiawan, T., Riasnugrahani, M., & de Jong, E. (2023). Psychometric properties of Indonesian slums dwellers' *place attachment*. *Heliyon*, 9(9), e19704. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19704>
- Surtiari, G. A. K. (2019). Pentingnya penanganan pascabencana yang berfokus pada penduduk untuk mewujudkan build back better: pembelajaran dari bencana Palu, Sigi, dan Donggala. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(2), 165-184.
- Wang, Z., Han, Z., Liu, L., & Yu, S. (2021). *Place attachment* and Household Disaster Preparedness: Examining the Mediation Role of Self-Efficacy. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 5565. <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/5565>
- Williams, D., & Vaske, J. (2003). The Measurement of *Place attachment*: Validity and Generalizability of a Psychometric Approach. *Forest Science*, 49, 830-840. <https://doi.org/10.1093/forestscience/49.6.830>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research Design and Application: Design and Methods (Sixth Edition)*. SAGE Publications.